

IDENTIFIKASI KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DI KAWASAN WURING, KABUPATEN SIKKA, NUSA TENGGARA TIMUR

Kristiana Bebbe¹, Yuliana Bhara Mberu²

1,2. Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Katolik Widya Mandira,
Penfui, Kupang

Email: ¹ kristianabebhe@yahoo.com, ²liamberu31@gmail.com

Abstrak

Kawasan Wuring yang terletak di Kabupaten Sikka dan didominasi oleh Suku Bajo mempunyai isu menyangkut kawasan permukiman kumuh. Identifikasi kawasan permukiman kumuh ini dilakukan untuk menjadi data dasar dan informasi terkait kawasan kumuh bagi pemerintah daerah, perencana, perancang dan pengembang kawasan dalam membuat keputusan untuk menangani kawasan permukiman kumuh. Penentuan kriteria kawasan permukiman kumuh mempertimbangkan berbagai aspek seperti kondisi infrastruktur, kepadatan bangunan, kondisi kependudukan dan legalitas lahan. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan identifikasi dan penilaian lokasi kawasan permukiman kumuh di kawasan Wuring, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur serta membuat rekomendasi penanganan masalah permukiman kumuh tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deduktif yang berpedoman pada kriteria-kriteria yang terdapat pada Buku Pedoman Identifikasi Permukiman Kumuh Direktorat Pengembangan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum. Hasil penelitian menunjukkan kawasan Wuring memiliki tingkat kekumuhan yang tinggi dan status kepemilikan lahan tidak legal yang tinggi.

Kata kunci: identifikasi, permukiman kumuh, kawasan wuring.

Abstract

Title: *Identification of Slum Settlement in Wuring Area, Sikka District, East Nusa Tenggara*

The Wuring area, located in Sikka regency East Nusa Tenggara province. This settlement is dominated by the Bajo tribe and considered as a slum area. The identification of slum areas was carried out in order to provide basic data and slums-related information for local governments, planners, designers and area developers in making decisions or considerations in handling the slum settlement program. Determine criteria for slum areas was conducted by considering various aspects or dimensions such as the suitability of the location allotment related with spatial planning, land status (ownership), location, level of population and building density and physical, social, economic and cultural conditions of the local community. The study aims to identify and assess the location of slum areas in the Wuring area and furthermore recommend how the handling of this slum areas. For this purpose, the deductive research method using the criterias based on the Slum Settlement Identification Handbook issued by the Directorate of Settlement Development, Directorate General of Human Settlements, Indonesian Ministry of Public Works. The result of the study is that in the Wuring area has high level of slums and illegal land status.

Keywords: *identification, slum areas, Wuring area.*

Pendahuluan

Kawasan permukiman Wuring yang terletak di Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur didominasi oleh Suku Bajo. Kawasan ini mempunyai isu menyangkut kawasan permukiman kumuh. Walaupun masih dalam

tahap jumlah populasi yang cenderung sedikit, tidak membuat kabupaten ini terlepas dari permasalahan permukiman kumuh.

Dampak dari permasalahan kawasan permukiman kumuh selalu berpengaruh pada kesehatan. Pengaruh buruk yang dihasilkan

berupa kualitas hidup penduduk yang menurun hingga wabah penyakit yang marak. Oleh sebab itu, untuk mencegah segala dampak negatif yang akan terjadi, maka dibutuhkan penanganan-penanganan yang baik dan sesuai dengan standar yang ada serta tetap mengacu pada peraturan-peraturan yang mengatur hal tersebut.

Kawasan permukiman Wuring berada di pesisir pantai memiliki beragam masalah permukiman kumuh, diantaranya kepadatan bangunan yang cukup tinggi, letak bangunan hunian yang tidak teratur, kondisi jalan lingkungan yang tidak memiliki drainase, minimnya penyediaan air bersih, pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan tidak tersedianya sarana prasarana pengelolaan sampah, sehingga sampah-sampah dibuang sembarangan pada pekarangan dan area pantai.

Tujuan melakukan identifikasi kawasan permukiman kumuh pada kawasan Wuring adalah untuk menjadi data dasar dan informasi terkait kawasan kumuh, terutama bagi pemerintah, perencana dan perancang serta pengembang kawasan saat membuat keputusan atau pertimbangan penanganan kawasan permukiman kumuh Wuring. Sehingga dalam menentukan kriteria kawasan permukiman kumuh dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang sesuai dengan standart yang berlaku.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deduktif, dengan menggunakan kriteria-kriteria pada Buku Pedoman Identifikasi Permukiman Kumuh yang diterbitkan oleh Direktorat Pengembangan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum. Pelaksanaan identifikasi ini dilaksanakan di kawasan Wuring, Kabupaten Sikka. Mengatasi permasalahan yang dihadapi, diawali dengan kegiatan persiapan dan dilanjutkan dengan kegiatan observasi lokasi dan yang terakhir adalah penentuan lokasi kawasan kumuh, apakah wilayah ini

termasuk dalam kategori permukiman kumuh ringan, sedang atau berat.

Metode Pengumpulan Data

Kegiatan pengumpulan data dilakukan melalui survey dengan menggunakan 2 (dua) metode pengumpulan data, yakni survey data instansional dan survey lapangan.

Kebutuhan data penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Data primer yang dibutuhkan antara lain data Prasarana - Sarana dan Utilitas (PSU) dan data penggunaan lahan. Sedangkan data sekunder yang akan dikumpulkan antara lain adalah regulasi – regulasi yang mengatur atau dasar – dasar hukum, dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Nusa Tenggara Timur, dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sikka, studi-studi terdahulu terkait dengan kawasan perencanaan dan juga dokumen lain yang terkait.

Metode Pelaksanaan Pekerjaan

Metode pelaksanaan dalam pekerjaan identifikasi permukiman kumuh ini adalah sebagai berikut:

Tahap persiapan terdiri dari:

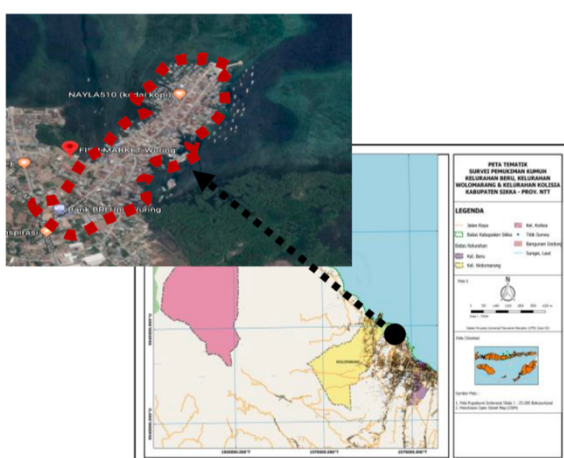
1. Tahap survey dan observasi
2. Identifikasi lokasi
3. Identifikasi kondisi kekumuhan
4. Identifikasi legalitas lahan
5. Identifikasi pertimbangan lain
6. Penilaian lokasi

Penilaian lokasi dilakukan untuk menilai:

1. Kondisi kekumuhan
Aspek permasalahan kekumuhan terdiri atas:
 - Klasifikasi kumuh kategori ringan
 - Klasifikasi kumuh kategori sedang
 - Klasifikasi kumuh kategori berat
2. Legalitas lahan
Aspek legalitas lahan terdiri atas:
 - Klasifikasi status lahan legal
 - Klasifikasi status lahan tidak legal
3. Pertimbangan lain
Aspek pertimbangan lain dengan klasifikasi:
 - Kategori rendah

- Kategori sedang
- Kategori tinggi

Kegiatan penilaian dilakukan dengan cara melakukan pembobotan dengan melihat masing-masing kriteria. Fokus kegiatan identifikasi kawasan kumuh di Kabupaten Sikka adalah kawasan Wuring pada RT 025-RT 038/ RW 007 Kecamatan Alok Barat, Kelurahan Wolomarang. Berdasarkan SK Bupati lokasi permukiman kumuh di Kabupaten Sikka khususnya Kawasan Wuring adalah 14.36 Ha.



Gambar 1. Peta delineasi penelitian
Sumber: Analisis peneliti dan Google Earth

Hasil dan Pembahasan

Tipologi Kawasan Permukiman Kumuh Wuring

Tipologi kawasan permukiman kumuh Wuring adalah permukiman kumuh nelayan dan permukiman kumuh daerah pasang surut.

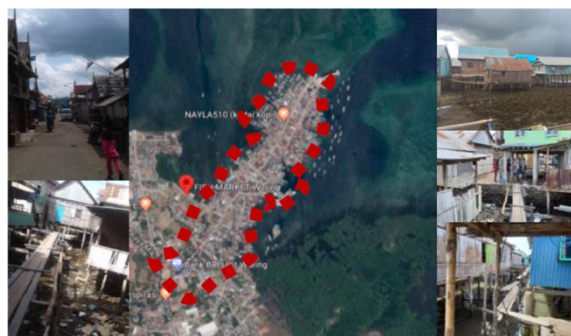
Fakta dan Analisis

Dalam pelaksanaan penyusunan identifikasi permukiman kumuh dilakukan dengan melakukan survey pada lokasi kajian kemudian dianalisis untuk menentukan tipologi dan rencana pengembangan.

Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh

Wilayah identifikasi kawasan kumuh adalah Kabupaten Sikka, Kecamatan Alok Barat, Kelurahan Wolomarang, kawasan Wuring

pada RT 025-RT 038/ RW007 dengan Luasan 14,36 Ha.



Gambar 2. Gambaran kondisi permukiman kumuh di kawasan Wuring
Sumber: Google Earth dan hasil survey, 2019

1. Kondisi Bangunan Gedung

Kondisi mayoritas bangunan hunian pada lokasi tidak teratur, bangunan hunian memiliki material alas, atap dan dinding non permanen. Sedangkan lokasi permukiman memiliki kepadatan bangunan yang cukup tinggi dengan berdiri pada tepi pantai.



Gambar 3. Kondisi bangunan gedung pada kawasan Wuring
Sumber: Hasil survey, 2019

2. Kondisi Jalan Lingkungan

Kondisi sebagian jalan lingkungan memiliki kualitas permukaan jalan yang baik, namun jalan lingkungan yang dibangun tidak disertakan dengan drainase/saluran air sehingga saat hujan air mengikis sebagian jalan. Sebagian jalan lingkungan dibuat dengan menggunakan kayu atau bambu oleh

masyarakat sendiri untuk dapat terakses langsung dengan rumah mereka.



Gambar 4. Kondisi jalan lingkungan di kawasan Wuring

Sumber: Hasil survey, 2019

3. Kondisi Drainase Lingkungan

Jalan lingkungan tidak dilengkapi dengan drainase.



Gambar 5. Kondisi drainase lingkungan kawasan Wuring

Sumber: Hasil Survey, 2019

4. Kondisi Penyediaan Air Minum

Akses air minum pada lokasi menggunakan sumur dan pelayanan dari PDAM. Mayoritas belum memenuhi kebutuhan air bersih (60lt/hari), 1 unit terpasang PDAM melayani 3-4 KK sehingga seringkali masyarakat masih membeli air dari mobil tangki untuk memenuhi kebutuhannya.



Gambar 6. Kondisi penyediaan air minum di kawasan Wuring

Sumber: Hasil survey, 2019

5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah

Limbah yang dihasilkan dari rumah tangga langsung dibuang ke pantai tanpa penyaringan. Sedangkan untuk pembuangan WC, mayoritas kloset terhubung *septic tank*. Pengolahan limbah sebagian telah terlayani IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) komunal.



Gambar 7. Kondisi pengelolaan air limbah di kawasan Wuring

Sumber: Hasil survey, 2019

6. Kondisi Pengelolaan Persampahan

Tidak ada sarana dan prasarana pengelolaan sampah pada kawasan. Sampah-sampah dibuang sembarangan pada pekarangan dan area pantai tempat masyarakat menetap.



Gambar 8. Kondisi penyediaan pengelolaan persampahan di kawasan Wuring

Sumber: Hasil survey, 2019

7. Kondisi Proteksi Kebakaran

Pada kawasan ini tidak disediakan sarana dan prasarana proteksi kebakaran.



Gambar 9. Kondisi kawasan perumahan tanpa proteksi kebakaran

Sumber: Hasil survey, 2019

Format Numerik Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Wuring

Data umum kawasan Wuring ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Data umum kawasan Wuring

Kawasan	: Wuring	Luasan SK	14,36 Ha
Kelurahan	: Wolomarang	Luasan Verifikasi	14,36 Ha
Kecamatan	: Alok Barat	Jumlah Bangunan	
Kabupaten	: Sikka	Jumlah Penduduk	2227 Jiwa
Provinsi	: NTT	Jumlah KK	565 KK

Sumber: Hasil survey, 2019

Data Numerik Parameter Kekumuhan

Data numerik dan parameter kekumuhan di kawasan Wuring dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Data numerik parameter kekumuhan

1.	Aspek kondisi bangunan gedung a. Ketidakteraturan bangunan b. Tingkat kepadatan bangunan c. Persyaratan teknis bangunan	Jumlah bangunan tidak teratur Luas kawasan dengan kepadatan > 200/250 unit/Ha Jumlah bangunan tidak sesuai teknis	Numerik 580 unit 14,36 Ha 531 unit
2.	Aspek kondisi jalan lingkungan a. Cakupan pelayanan jalan lingkungan b. Kualitas permukaan jalan lingkungan	Panjang jalan ideal (standar minimal) Panjang jalan eksisting Panjang jalan dengan permukaan retak dan perubahan bentuk	920 m' 920 m'
3.	Aspek kondisi penyediaan air minum a. Ketersediaan akses aman air minum b. Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum	Jumlah KK tidak terakses air minum berkualitas Jumlah KK tidak terpenuhi air minum cukup	280 KK 280 KK
4.	Aspek kondisi drainase lingkungan a. Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air b. Ketidaktersediaan drainase c. Kualitas konstruksi drainase	Luas kawasan yang terkena genangan Panjang drainase ideal (standar minimal) Panjang saluran drainase eksisting Panjang saluran drainase rusak	460 m' 920 m' - -
5.	Aspek kondisi pengelolaan air limbah a. Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis b. Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis	Jumlah KK tidak terakses sistem air limbah Standar jumlah KK dengan sarana dan prasarana air limbah tidak sesuai standar teknis	565 KK 565 KK

6.	Aspek kondisi pengelolaan persampahan a. Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis	Jumlah KK dengan sarana prasarana pengolahan sampah yang tidak sesuai standar teknis	565 KK
	b. Sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis	Jumlah KK dengan sistem pengolahan sampah tidak sesuai standar teknis	565 KK
7.	Aspek kondisi proteksi kebakaran a. Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran	Jumlah bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran	565 KK
	b. Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran	Jumlah bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran	565 KK

Sumber: PERMEN PU & Perumahan Rakyat RI tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, 2018 dan hasil survey, 2019

Penilaian Lokasi

Untuk menentukan skala prioritas penanganan, maka dilakukan penilaian lokasi di kawasan Wuring yang disajikan dalam tabel 3 berikut.

Tabel 3. Penilaian Lokasi

TABEL FORMULASI PENENTUAN SKALA PRIORITAS PENANGANAN		
NILAI	KETERANGAN	LOKASI PERMUKIMAN KUMUH
		KAWASAN WURING
Kondisi Kekumuhan		
60 – 80	Kumuh Berat	X
38 – 59	Kumuh Sedang	
16 – 37	Kumuh Ringan	
Legalitas Lahan		
(+)	Status Lahan Legal	
(-)	Status Lahan Tidak Legal	X
Pertimbangan Lain		
11 – 15	Pertimbangan Lain Tinggi	
6 – 10	Pertimbangan Lain Sedang	X
1 – 5	Pertimbangan Lain Rendah	
SKALA PRIORITAS PENANGANAN =		A2

Sumber: PERMEN PU & Perumahan Rakyat RI tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, 2018 dan hasil survey, 2019

Tabel 4. Rangkuman penilaian

NO	NAMA LOKASI	LUAS	LINGKUP ADMINISTRATIF			KEPENDUDUKAN		KEKUMUHAN		PERTIMBANGAN LAIN		LEGALITAS TANAH	PRIORITAS
		(HA)	RT/RW	KEL. / DESA	KEC. / DISTRIK	JUMLAH	KEPADATAN	NILAI	TINGKAT	NILAI	TINGKAT		
1	KAWASAN WURING	14,36	RT042-049 RW 009	Kel. Wolomarang	Alok Barat	2227	Tinggi	62	TINGGI	11	TINGGI	TIDAK LEGAL	A2

Sumber: PERMEN PU & Perumahan Rakyat RI tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, 2018 dan hasil survey, 2019

Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa kawasan Wuring merupakan lokasi kumuh berat dengan pertimbangan lain tingkat tinggi dan status lahan tidak legal.

Kesimpulan

Berdasarkan penilaian maka dapat disimpulkan bahwa permukiman kumuh pada Kabupaten Sikka, khususnya kawasan Wuring termasuk dalam kategori kumuh berat dengan penilaian tingkat kepadatan penduduk, tingkat kekumuhan (62) dan pertimbangan lain tinggi (11), serta status lahan tidak legal.

Beberapa cara penanganan kawasan permukiman kumuh dapat ditawarkan pada kawasan kumuh Wuring yang termasuk dalam klasifikasi permukiman kumuh tinggi dengan merujuk pada UU no. 4/1999 tentang perumahan dan permukiman, pasal 27 ayat 2, yaitu: (1.) Melakukan peremajaan, dengan cara meningkatkan kualitas kawasan dengan melakukan kegiatan perombakan untuk perubahan yang mendasar dan menata secara keseluruhan kawasan tempat tinggal yang tidak layak ditempati. (2.) Permukiman kembali (*resettlement*), yaitu upaya menempatkan permukiman pada lokasi yang secara khusus disediakan. Diprioritaskan bagi permukiman yang menempati tanah negara atau rawan bencana. (3.) *Land sharing*, yaitu melakukan penataan ulang di atas lahan dengan status kepemilikan masyarakat cukup tinggi. Setelah dilakukan penataan masyarakat kembali mendapatkan lahannya sebagaimana yang dimilikinya, dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk prasarana umum. Sesuai peruntukan kawasan kumuh dengan status kepemilikan legal/ sah cukup tinggi, tingkat kekumuhan tinggi namun tata letak permukiman semrawut/ tidak berpola. (4.) *Land Consolidation* (LC), yaitu melakukan penataan ulang pada lahan yang selama ini ditempati masyarakat dengan status kepemilikan lahan illegal atau tidak sah cukup tinggi, tata letak bangunan dan permukiman yang tidak berpola serta pemanfaatan yang beragam, memiliki potensi

menjadi kawasan yang lebih fungsional dan strategis serta dimungkinkan adanya *mix use*. Sesuai karakteristik lokasi di atas, maka pola penanganan permukiman kumuh pada kawasan Wuring menggunakan pola penanganan kuratif (penanggulangan).

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sikka. (2019). *Kabupaten Sikka dalam angka*. Maumere: BPS Kabupaten Sikka.
- Departemen Pekerjaan Umum. (2018). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia no. 14/PRT/M/2018 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh*. Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum RI.
- Direktorat Pengembangan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum. (2006). *Pedoman identifikasi kawasan permukiman kumuh penyangga kota metropolitan*. Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum RI.
- Kementerian Perumahan Rakyat. (2012). *Penanganan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh berbasis kawasan (PLP2K-BK)*. Jakarta: Kementerian Perumahan Rakyat RI.
- Republik Indonesia. (2011). *UU no. 1/ 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman*. Jakarta: Lembaran Negara RI.
- Republik Indonesia. (1999). *UU no. 4/ 1999 tentang perumahan dan permukiman pasal 27 ayat 2*. Jakarta: Lembaran Negara RI.